

## ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SINKRONISASI  
PENDAFTARAN TANAH YANG DIKUASAI NEGARA  
(Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok  
Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang  
Perbendaharaan Negara)

Pendaftaran tanah yang dikuasai negara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria diatur pelaksanaannya melalui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun realitasnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjelaskan bahwa barang milik Negara yang dikuasai pemerintah wajib disertipikatkan atas nama pemerintah pusat/daerah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan filosofi yang ada pada UUPA dan peraturan pelaksanaan dibawahnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji atau menganalisis pengaturan tentang pendaftaran tanah yang dikuasai Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai dengan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum dan untuk mengkaji atau menganalisis sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengembangan penelitian ilmu hukum dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah dan masyarakat dalam hal pendaftaran tanah yang dikuasai Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data seperti perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat ahli yang berhubungan dengan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara, sehingga diperlukan adanya penyesuaian pada peraturan perundang-undangan tersebut.

***Kata Kunci: Sinkronisasi, Pendaftaran Tanah, Tanah Negara.***

## ABSTRACT

### JUDICIAL ANALYSIS ON THE SYNCHRONIZATION OF LAND REGISTRATION OWNED BY THE STATE

**(Viewed from Law No. 5 of 1960 on Agrarian Basic Law and Law No.1  
of 2004 on State Treasury)**

The registration to lands owned by the State as amended by Law No. 5 of 1960 on Agrarian Basic Law is governed for its implementation in the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. However, in reality, in article 49 paragraph (1) of Law No. 1 of 2004 on State Treasury, it explains that state owned assets controlled by government shall be certified in the name of center/ regional government. It is in contrary with the philosophy in the Agrarian Basic Law and the lower regulations.

The aims of this research were to study or analyze the legislations on the registration of lands owned by the State viewed from Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law and Law No. 1 of 2004 on State Treasury in accordance with the principles of justice, benefit, and legal certainty, and to study and analyze the synchronization between Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law and Law No. 1 of 2004 on State Treasury. The research results were expected to provide benefit for the sake of science that can be the input to the government and society in the registration of lands owned by the state.

This research used the research method of normative-judicial using the data such as laws, legal theories, and expert's opinion related to the synchronization between Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law and Law No. 1 of 2004 on State Treasury, particularly the registration of lands owned by the State.

Based on the research results, it can be concluded that the Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law and Law No. 1 of 2004 on State Treasury regarding the registration to lands owned by the State are not synchronized. Therefore, it requires synchronization to the laws.

**Keywords: *Synchronization, Land Registration and State Land.***